OPTIMALISASI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SERANG

Mohammad Haqqi Sandhiyudha
NPP. 33.0599
Program Studi Keuangan Publik
Email: sandasandi1933@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA
Email: tumpak@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the low contribution of parking retribution to the Regional Original Revenue (PAD) of Serang City, which consistently remains below 1%, alongside a significant discrepancy between the vehicle volume reported by the Transportation Agency and the actual revenue recorded by the Regional Revenue Agency. In 2025, the revenue realization reached only 48% (IDR 720 million out of a IDR 1.5 billion target), yet the 2026 target was drastically increased to IDR 4.1 billion without any systemic improvements, highlighting a critical vulnerability to systemic revenue leakage.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the optimization of parking retribution toward the Regional Original Revenue (PAD) of Serang City.* ***Method:*** *This study utilizes a descriptive qualitative method with an inductive approach. The analytical framework is based on Siringoringo's (2005) optimization theory, covering three dimensions: Purpose, Alternative Decisions, and Limited Resources. Data collection techniques include field observation, documentation studies, and in-depth interviews with 9 key informants, consisting of Regional Revenue Agency officials, Transportation Agency officers, parking attendants, and public users in Serang City.* ***Result:*** *The findings indicate that parking retribution management in Serang City is not yet optimal. In the purpose dimension, target setting is unrealistic and human resource planning is immature. In the alternative decisions dimension, inter-agency coordination is weak due to the Regional Revenue Agency's lack of command authority over the Transportation Agency, coupled with a highly tiered 6-stage cash collection SOP prone to leakage. In the limited resources dimension, the collection system heavily relies on manual practices, ticket distribution is inconsistent due to a "trust system", illegal parking is rampant, and field supervision suffers from a shortage of qualified personnel.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the optimization of parking retribution toward Serang City's PAD has not been fully achieved due to systemic operational and structural governance weaknesses. Recommendations include revising regional regulations to mandate non-cash e-parking digitalization, adjusting targets based on empirical potential assessments, re-registering and training parking attendants, and strengthening inter-agency coordination by establishing a special task force directly led by the Regional Secretary.*

Keywords: *Optimization; Parking Retribution; Regional Original Revenue; Serang City.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang yang konsisten berada di bawah 1% serta ketidaksesuaian laporan volume kendaraan Dinas Perhubungan dengan realisasi penerimaan Badan Pendapatan Daerah. Data menunjukkan realisasi tahun 2025 sebesar Rp720 juta hanya mencapai 48% dari target Rp1,5 miliar, namun target tahun 2026 justru dinaikkan drastis menjadi Rp4,1 miliar tanpa didukung perbaikan sistemik, sehingga mengindikasikan adanya celah kebocoran pendapatan daerah yang signifikan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Analisis mendalam dilakukan menggunakan pisau analisis teori optimalisasi Siringoringo (2005) yang mencakup tiga dimensi: Tujuan, Alternatif Keputusan, dan Sumber Daya yang Dibatasi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam kepada 9 informan kunci yang terdiri dari pejabat Bapenda, petugas UPT Perparkiran Dishub, juru parkir, dan masyarakat pengguna layanan parkir di Kota Serang. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Serang belum berjalan secara optimal. Pada dimensi Tujuan, penetapan target pendapatan tidak realistis dan perencanaan SDM kurang matang. Pada dimensi Alternatif Keputusan, koordinasi lintas instansi lemah karena Bapenda tidak memiliki wewenang komando langsung terhadap Dishub, diperparah oleh SOP pemungutan tunai yang terlalu berjenjang (6 tahap) sehingga rawan kebocoran. Adapun pada dimensi Sumber Daya yang Dibatasi, sistem pemungutan masih manual, penggunaan karcis tidak konsisten akibat maraknya "sistem kepercayaan", maraknya praktik parkir liar, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas pengawas lapangan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi retribusi parkir terhadap PAD Kota Serang belum tercapai secara maksimal akibat adanya kelemahan tata kelola manajemen operasional dan struktural birokrasi. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya revisi Perda untuk mewajibkan digitalisasi sistem *e-parking* nontunai secara menyeluruh, penyesuaian target berbasis kajian potensi riil di lapangan, pelaksanaan pendataan ulang dan pelatihan juru parkir, serta penguatan koordinasi lintas OPD melalui pembentukan tim khusus di bawah komando langsung Sekretaris Daerah.

Kata kunci: Kota Serang; Optimalisasi; Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Parkir.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Serang selaku ibu kota Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Peningkatan mobilitas masyarakat urban ini berdampak langsung pada tingginya volume kendaraan bermotor yang memicu ketimpangan antara permintaan ruang parkir dengan ketersediaan lahan yang terbatas di pusat kota. Kondisi ketimpangan tersebut apabila tidak diikuti oleh manajemen ruang penataan yang baik berpotensi menurunkan efisiensi lalu lintas jalan (Fanggidae & Kapioru, 2016). Hambatan lalu lintas berupa kemacetan parah pada area pusat kota sering kali diperburuk oleh tata letak ruang perparkiran tepi jalan yang mengurangi kapasitas efektif jalan perkotaan (Said & Syafey, 2021). Sektor perparkiran secara luas dipandang sebagai komponen retribusi jasa umum yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dikembangkan secara optimal (Runtu dkk., 2023). Pengelolaan

retribusi yang ideal pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada aspek finansial semata, melainkan menjadi instrumen regulatif birokrasi dalam menata ketertiban ruang publik wilayah perkotaan (Labolo, 2014).

Realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Serang dalam perkembangannya konsisten menghadapi tantangan administratif yang cukup pelik. Pemungutan retribusi daerah secara hukum merupakan iuran wajib yang ditarik oleh pemerintah lokal atas pemberian fasilitas pelayanan publik guna mendanai urusan rumah tangga daerah otonom (Sinaga dkk., 2025). Catatan empiris performa fiskal daerah memperlihatkan bahwa kontribusi retribusi parkir di Kota Serang pada periode tahun 2020–2024 masih berada pada kisaran sangat rendah, yaitu di bawah angka 1 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rahayu dkk., 2023). Ketetapan harga atau tarif parkir yang terlalu murah dan tidak fleksibel juga memicu kerugian ekonomi karena ruang publik tidak dikelola berbasis nilai permintaan riil masyarakat (Pierce & Shoup, 2013). Performa capaian yang minim dan fluktuatif ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam fungsi perencanaan target serta pengawasan administratif di tingkat operasional lapangan (Sinurat dkk., 2025).

Ketidaksesuaian yang lebar antara laporan jumlah volume kendaraan di lapangan dengan realisasi uang retribusi yang masuk ke kas daerah mencerminkan adanya kebocoran pendapatan secara sistematis. Praktik pemungutan tradisional yang didominasi oleh sistem karcis manual serta penerapan "sistem kepercayaan" tanpa transparansi rantai setoran memperbesar peluang hilangnya potensi fiskal daerah (Cheisviyanny et al., 2023). Proses pencapaian efisiensi pemungutan ini memerlukan implementasi strategi penataan yang komprehensif melalui pemetaan dimensi tujuan yang rasional serta alternatif keputusan taktis yang terukur (Siringoringo, 2005). Manajemen keuangan daerah yang sehat mensyaratkan adanya akuntabilitas pelaporan harian yang sinkron antara instansi teknis pemungut dengan koordinator pengelolaan pendapatan (Sinurat, 2018).

Pemerintah Kota Serang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperbarui landasan hukum pemungutan agar relevan dengan perkembangan kapasitas wilayah. Penataan regulasi ini sejalan dengan kajian ilmiah yang menyatakan bahwa kejelasan aturan hukum dan efektivitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan pengumpulan pendapatan lokal (Sinaga dkk., 2025). Hambatan operasional sejenis juga ditemukan di berbagai daerah berkembang di Indonesia, seperti lemahnya fungsi pengawasan birokrasi di Kabupaten Seruyan (Hayati, 2016), ketidakakuratan data pelaporan fiskal di Kabupaten Pacitan (Sulastiningsih dkk., 2023), serta rendahnya kontribusi finansial akibat kurangnya kontrol di Kabupaten Jember (Haerah, 2018) dan Kabupaten Malang (Putri, 2016).

Inovasi tata kelola berbasis digital menjadi pilihan strategis yang rasional untuk mengatasi kelemahan sistem pemungutan manual di era modern. Penerapan ekosistem parkir pintar terintegrasi terbukti mampu mengoptimalkan alokasi ruang sekaligus menjadi instrumen peningkatan pendapatan daerah yang sangat menguntungkan (Lin et al., 2017). Penerapan sistem parkir elektronik (*e-parking*) di beberapa kawasan perkotaan terbukti mampu meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mendongkrak realisasi penerimaan retribusi daerah secara signifikan (Rahayu dkk., 2023). Implementasi sistem digital daring yang terintegrasi ini juga efektif dalam mendeteksi manipulasi finansial di lapangan serta mereduksi angka kebocoran anggaran daerah hingga mencapai 25 persen (Ananda dkk., 2024). Transformasi penarikan pendapatan publik berbasis teknologi ini pada dasarnya mengimplementasikan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan (Labolo, 2014).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang yang konsisten berada di bawah 1 persen dari total PAD dalam periode tahun 2020–2024. Sektor perparkiran idealnya menjadi salah satu komponen retribusi jasa umum unggulan yang dioptimalkan kinerjanya demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah (Sinaga et al., 2025). Pemerintah Kota Serang menetapkan target penerimaan retribusi parkir tahun 2025 sebesar Rp1,5 miliar, tetapi realisasinya di lapangan hanya mampu mencapai Rp720 juta atau sekitar 48 persen saja. Otoritas fiskal daerah justru menaikkan target penerimaan tahun 2026 secara drastis menjadi Rp4,1 miliar tanpa disertai adanya pembenahan sistem pemungutan yang signifikan di tingkat operasional.

Kesenjangan administratif yang sangat krusial ditemukan pada ketidaksesuaian data antara laporan volume kendaraan milik Dinas Perhubungan dengan laporan realisasi penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah. Catatan Dinas Perhubungan menunjukkan volume kendaraan yang parkir di tepi jalan umum sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mencapai 1.657.385 unit kendaraan roda dua dan 918.925 unit kendaraan roda empat. Perhitungan potensi finansial riil berdasarkan volume tersebut seharusnya mampu menghasilkan pendapatan daerah mencapai Rp6,5 miliar apabila mengacu pada tarif resmi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Evaluasi terhadap data penerimaan empiris mengungkap adanya selisih (*gap*) rata-rata sebesar 43,01 persen per tahun, dengan kebocoran tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 48,42 persen atau setara dengan Rp846.136.000 potensi keuangan daerah yang hilang.

Tata kelola kelembagaan di lapangan juga memperlihatkan hambatan struktural terkait pembagian wewenang antarinstansi yang belum terintegrasi secara optimal. Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator penerimaan daerah tidak memiliki wewenang komando langsung terhadap Dinas Perhubungan yang bertindak sebagai pelaksana teknis pemungutan retribusi parkir. Mekanisme operasional pemungutan aktual masih mengandalkan Standard Operating Procedure (SOP) manual yang terlalu panjang dan berjenjang hingga melewati enam tahapan birokrasi transaksi tunai. Kondisi rantai setoran yang panjang ini diperparah oleh maraknya praktik "sistem kepercayaan" antara juru parkir dengan wajib retribusi yang mengakibatkan karcis resmi tidak selalu diberikan sebagai alat kontrol finansial (Cheisviyanny et al., 2023).

Berbagai studi terdahulu telah banyak membahas tentang rendahnya efektivitas retribusi, kelemahan sistem manual, dan maraknya kebocoran parkir di berbagai daerah Indonesia, namun masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji tata kelola tersebut melalui pendekatan kualitatif manajerial. Penelitian selama ini cenderung berfokus pada perhitungan potensi kuantitatif nominal fiskal semata tanpa mengupas kedalaman aspek hubungan kelembagaan. Kajian ini hadir untuk mengisi celah akademik tersebut dengan membedah secara mendalam dinamika interaksi aktor birokrasi, komitmen sumber daya, dan rasionalitas pilihan keputusan di Kota Serang menggunakan pisau analisis teori optimalisasi (Siringoringo, 2005).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat krusial untuk dilaksanakan saat ini guna memberikan landasan empiris serta solusi aplikatif terhadap permasalahan tata kelola pendapatan daerah, khususnya dalam optimalisasi retribusi parkir di Kota Serang. Kajian ini penting bagi pengembangan keilmuan keuangan publik dalam membedah implementasi teori optimalisasi pada

sektor retribusi jasa umum di wilayah perkotaan. Otoritas fiskal daerah dan instansi teknis terkait membutuhkan hasil analisis ini sebagai rujukan utama untuk mengevaluasi efektivitas pemungutan serta memperbaiki sistem administrasi keuangan menyusul diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Penemuan kesenjangan finansial berupa hilangnya potensi retribusi daerah yang mencapai rata-rata 43,01 persen per tahun menuntut adanya langkah pembenahan manajemen operasional yang cepat, terukur, dan komprehensif. Penundaan pelaksanaan penelitian ini akan mengakibatkan Pemerintah Kota Serang dan pemangku kebijakan kekurangan basis data empiris yang valid mengenai pola kebocoran anggaran fiskal di lapangan. Perumusan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran berisiko terus disusun secara spekulatif tanpa berbasis pada kajian potensi riil volume kendaraan, sehingga memicu ketidakpastian penganggaran tahunan. Rantai birokrasi *Standard Operating Procedure* (SOP) pemungutan tunai tradisional yang melewati enam tahapan akan terus berjalan tanpa adanya pengawasan ketat, yang pada akhirnya memperluas celah manipulasi finansial serta maraknya praktik parkir liar. Tata kelola retribusi parkir secara akumulatif akan berjalan kurang optimal atau bahkan mengalami stagnasi, sehingga menghambat akselerasi kemandirian fiskal daerah serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi pelayanan pemerintah daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang potensi, kontribusi, maupun tata kelola retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelaahan terhadap literatur ilmiah menunjukkan bahwa kajian mengenai perparkiran memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan teoritis yang beragam. Rahayu dkk. mengkaji dampak penerapan digitalisasi pembayaran parkir nontunai melalui perbandingan kondisi potensi sebelum dan sesudah penerapan *e-parking* di Kota Medan menggunakan metode campuran sekuensial deskriptif kuantitatif dan kualitatif (Rahayu et al., 2023). Eliasson dan Maria mengevaluasi kebijakan tarif perparkiran menggunakan analisis empiris serta pemodelan *cost-benefit analysis* untuk menilai tingkat okupansi sosial di kawasan Stockholm (Eliasson & Börjesson, 2022). Purnomo dkk. melakukan penelitian deskriptif kuantitatif berupa simulasi perbandingan struktur tarif parkir adaptif guna merancang proyeksi optimalisasi pendapatan retribusi di Kabupaten Ponorogo (Purnomo et al., 2023). Fahlevi meneliti dampak pelaksanaan retribusi parkir konvensional menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik observasi dan wawancara mendalam di Kabupaten Pinrang (Fahlevi, 2024). Cheisviyanny dkk. menelaah faktor penyebab mismanajemen keuangan perparkiran dan penegakan hukum juru parkir ilegal menggunakan pendekatan kualitatif interpretif metode campuran di Kota Padang (Cheisviyanny et al., 2023). Fajri dkk. melakukan analisis pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pengelolaan terhadap komponen pajak parkir dan retribusi parkir menggunakan metode kualitatif deskriptif di Kota Pekanbaru (Fajri dkk., 2024). Rangkaian studi terdahulu tersebut secara kolektif memperlihatkan dominasi metode deskriptif kualitatif serta simulasi kuantitatif dengan karakteristik objek penelitian yang bervariasi sesuai urgensi fiskal daerah masing-masing.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang memiliki perbedaan mendasar dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Kebaruan ilmiah dalam kajian ini terletak pada fokus analisis kualitatif deskriptif yang mendalam untuk membedah tata kelola manajerial operasional serta koordinasi struktural birokrasi perparkiran di Kota Serang pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Fokus operasional manajerial tersebut berbeda dengan studi simulasi perencanaan tarif adaptif milik Purnomo dkk. (Purnomo et al., 2023) serta model ekonometrik kesejahteraan sosial milik

Eliasson dan Maria (Eliasson & Börjesson, 2022). Penerapan metode kualitatif deskriptif murni berpendekatan induktif dalam penelitian ini membedakannya dari penggunaan metode campuran sekuensial oleh Rahayu dkk. (Rahayu et al., 2023) maupun metode campuran interpretif oleh Cheisviyanny dkk. (Cheisviyanny et al., 2023). Landasan teori yang digunakan peneliti mengacu secara spesifik pada Teori Optimalisasi (Siringoringo, 2005) dengan tiga dimensi utama meliputi Tujuan, Alternatif Keputusan, dan Sumber Daya yang Dibatasi. Pilihan pisau analisis tersebut menjadi pembeda utama dari studi milik Fahlevi (Fahlevi, 2024) serta Fajri dkk. (Fajri dkk., 2024) yang menitikberatkan kajian pada analisis pertumbuhan ekonomi, efektivitas rasio nominal, atau reduksi data makro tanpa membedah secara utuh kedalaman tata kelola dimensi manajemen operasional daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai optimalisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif (Ardieansyah dkk., 2023). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggambarkan secara mendalam, faktual, dan menyeluruh mengenai realitas tata kelola pemungutan retribusi tanpa adanya manipulasi terhadap variabel penelitian. Pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan melalui fenomena operasional di lapangan untuk kemudian diabstraksikan menjadi pemahaman yang lebih umum. Penerapan metode kualitatif deskriptif ini dinilai paling tepat untuk memahami secara komprehensif dinamika koordinasi antaraktor birokrasi serta mengidentifikasi celah kebocoran finansial pada sektor perparkiran daerah.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti menetapkan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Serang, pegawai ASN Dishub, serta tenaga kontrak Dishub selaku pelaksana teknis sebagai informan wawancara. Informan lainnya berasal dari unsur internal Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meliputi Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Kepala Bidang Anggaran dan Retribusi. Peneliti juga mewawancarai dua juru parkir di lokasi Alun-alun dan Pasar Lama, serta tiga orang perwakilan masyarakat selaku wajib retribusi pengguna layanan parkir roda dua maupun roda empat. Peneliti memanfaatkan data sekunder berupa laporan target dan realisasi keuangan retribusi parkir periode 2020–2025 serta dokumen Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024.

Pengujian keabsahan dan ketelitian data dalam penelitian ini mengandalkan teknik triangulasi. Penerapan triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali hasil temuan lapangan melalui beragam sumber informasi, perbedaan metode, maupun variasi waktu (Simangunsong, 2016). Peneliti memadukan teknik observasi non-partisipatif di area parkir *on-street* maupun *off-street*, wawancara mendalam dengan para pihak terkait, serta studi dokumentasi rekapitulasi realisasi anggaran kas daerah. Langkah memadukan berbagai teknik dan sumber informasi

ini bertujuan untuk mengurangi potensi bias subjektif serta menghasilkan gambaran data yang utuh, akurat, dan terpercaya mengenai pengelolaan retribusi parkir.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif yang berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai kejenuhan data. Tahapan analisis data tersebut mengacu pada pandangan Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan ringkasan transkrip wawancara yang paling relevan dengan inti permasalahan. Penyajian data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif naratif serta matriks tabel guna memperjelas keterkaitan informasi. Proses penarikan kesimpulan akhir dipadukan dengan tiga dimensi teori optimalisasi yang meliputi dimensi Tujuan, Alternatif Keputusan, dan Sumber Daya yang Dibatasi (Siringoringo, 2005).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Serang, Provinsi Banten, dengan lokus operasional bertempat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah serta Kantor Dinas Perhubungan Kota Serang. Pengamatan lapangan secara spesifik difokuskan pada beberapa titik parkir strategis meliputi kawasan Alun-alun Kota Serang, Pasar Lama atau Kawasan Royal Baroe, dan kawasan Ciruas. Pengumpulan data empiris secara intensif dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025/2026. Peneliti memanfaatkan alokasi durasi tersebut untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan observasi awal, wawancara mendalam, hingga kompilasi dokumen realisasi fiskal secara kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang menggunakan teori optimalisasi dari (Siringoringo, 2005) yang menyatakan bahwa proses optimalisasi dapat diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Pembahasan hasil penelitian lapangan ini disajikan secara mendalam berdasarkan kompilasi data wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada subbab berikut.

3.1. Tujuan

Perencanaan penetapan kebijakan retribusi parkir di Kota Serang secara legalistik telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah menetapkan tarif resmi parkir tepi jalan umum senilai Rp2.000 untuk kendaraan roda dua serta Rp3.000 untuk kendaraan roda empat. Dokumen administrasi mencatat keberadaan 40 titik lokasi parkir resmi yang telah disetujui melalui Keputusan Wali Kota Serang. Pelaksanaan pengawasan zona parkir di lapangan sering kali belum berbasis pada skala prioritas potensi riil objek retribusi. Aparatur Dinas Perhubungan cenderung memusatkan konsentrasi pengawasan pada kawasan komersial Jalan Sultan Agung Royal yang sedang menarik perhatian publik atau viral. Papan informasi mengenai rincian tarif resmi juga tidak terpasang secara merata pada ruang publik, sehingga memicu ketidakjelasan informasi bagi para pengguna jasa perparkiran.

Tabel 1.1
Perbandingan Potensi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Gap (%)
2020	1.026.175.000	559.998.000	466.177.000	45,43%
2021	1.504.089.000	897.957.000	606.132.000	40,30%
2022	1.747.636.000	901.500.000	846.136.000	48,42%
2023	1.398.785.000	868.757.000	530.028.000	37,89%
2024	856.439.000	870.652.000	-14.213.000	-1,66%

Sumber: Diolah Penulis dari Data Dishub dan Bapenda (2026).

Penetapan target penerimaan tahunan oleh pemerintah daerah memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar apabila disandingkan dengan realisasi empiris di kas daerah. Angka target retribusi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,5 miliar, tetapi realisasi riil hanya mampu menyentuh angka Rp720 juta atau berkisar 48 persen saja. Otoritas daerah menaikkan target penerimaan tahun 2026 secara drastis mencapai Rp4,1 miliar tanpa didukung oleh modernisasi sistem operasional. Penghitungan potensi finansial dari akumulasi jumlah kendaraan tahun 2020 hingga 2024 yang mencapai 1.657.385 unit roda dua dan 918.925 unit roda empat mengindikasikan taksiran pendapatan ideal senilai Rp6,5 miliar. Selisih atau *gap* rata-rata tahunan antara potensi volume kendaraan dengan setoran riil menyentuh angka 43,01 persen akibat perencanaan tujuan yang belum matang.

3.2. Alternatif Keputusan

Hubungan kelembagaan antara instansi pemungut retribusi di Kota Serang menunjukkan adanya hambatan struktural yang mempengaruhi efektivitas pencapaian hasil. Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan memiliki kedudukan organisasi yang sejajar dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah. Otoritas koordinasi fiskal milik Bapenda tidak dibekali dengan wewenang komando langsung untuk mengintervensi ataupun memerintah jajaran Dinas Perhubungan. Upaya evaluasi dan penegakan akuntabilitas penagihan memerlukan campur tangan formal dari pimpinan daerah tingkat tinggi seperti Sekretaris Daerah atau Wali Kota. Ketiadaan mekanisme komando terintegrasi ini menyebabkan rekomendasi perbaikan sistem tata kelola pendapatan sering kali berjalan lambat di tingkat operasional penagihan.

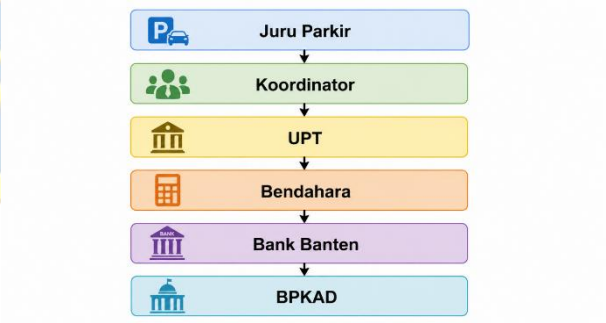

Sumber: Diolah dari Wawancara Dishub (2025).

Gambar 2.1
Alur Setoran Retribusi Parkir Kota Serang

Prosedur operasional yang melewati enam tahapan birokrasi uang tunai konvensional ini dinilai menciptakan banyak titik rawan kebocoran fiskal. Banyaknya rantai perantara menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih sulit karena transaksi perpindahan fisik uang belum terekam secara otomatis. Risiko keterlambatan pelaporan serta penyalahgunaan dana menjadi tinggi akibat lemahnya pemantauan transaksi penagihan. Identitas petugas di lapangan juga belum tertata rapi akibat maraknya pemalsuan atribut rompi resmi oleh oknum masyarakat. Masyarakat wajib retribusi mengalami kesulitan membedakan antara petugas pemungut resmi dengan juru parkir liar karena penggunaan atribut pelindung yang seragam tanpa kartu pengenal khusus.

3.3. Sumber Daya yang Dibatasi

Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penata lapangan menjadi kendala utama dalam optimalisasi pemungutan pendapatan daerah. Dinas Perhubungan mencatat keberadaan sekitar 400 juru parkir yang beroperasi, tetapi sebagian besar di antaranya belum terdaftar secara administratif dalam sistem kedinasan resmi. Petugas pemungut lapangan tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja berkala mengenai tata cara pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Juru parkir di kawasan Alun-alun Kota Serang mengakui sering kali menerapkan "sistem kepercayaan" dalam aktivitas transaksi harian. Karcis parkir resmi tidak selalu diserahkan kepada pemilik kendaraan motor atau mobil, sehingga menghilangkan fungsi utama lembaran kertas tersebut sebagai instrumen kontrol finansial. Pengguna layanan parkir cenderung memalumi uang kelebihan pembayaran tetap dibawa oleh juru parkir tanpa adanya pencatatan transaksi yang *real-time*.

Ketersediaan sarana prasarana penunjang transformasi teknologi digital di Kota Serang masih berada dalam kondisi yang sangat terbatas. Implementasi kebijakan sistem parkir elektronik atau *e-parking* nontunai baru berjalan sebagai proyek percontohan pada kawasan wisata Banten Lama Terminal Sukadiri dan area Alun-alun pusat kota. Mayoritas titik lokasi parkir potensial lainnya masih dikelola menggunakan metode pemungutan manual konvensional yang rentan manipulasi data. Dinas Perhubungan menghadapi keterlambatan inovasi teknologi jika dibandingkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah sukses menggunakan alat *e-POS* dan kode *QRIS* untuk retribusi pasar. Keterbatasan alokasi anggaran operasional daerah menjadi penghambat utama dalam penyediaan perangkat keras komputer, mesin cetak portabel, serta penguatan jaringan internet di lapangan. Penguatan komitmen pemanfaatan sumber daya teknologi mutlak diperlukan demi menyelaraskan tata kelola daerah dengan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kota Serang menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional dalam menopang Pendapatan Asli Daerah. Peneliti menemukan temuan penting bahwa kontribusi retribusi parkir di Kota Serang masih sangat rendah dan konsisten berada di bawah 1 persen dari total PAD. Studi terdahulu oleh (Fahlevi, 2024) menunjukkan hasil yang serupa, di mana kontribusi retribusi parkir di Kabupaten Pinrang berada pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata hanya 0,257 persen terhadap PAD akibat lemahnya pengawasan. Kondisi empiris ini juga memperkuat hasil penelitian Rahayu dkk. (Rahayu dkk., 2023) sebelum diterapkannya inovasi digital, di mana penerimaan sektor perparkiran Kota Medan periode 2019–2022 konsisten tertahan di bawah angka 1 persen dari total pendapatan asli daerah.

Tata kelola pemungutan yang masih bersifat manual memicu timbulnya celah kerawanan kebocoran finansial yang masif di tingkat operasional lapangan. Peneliti menemukan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar mencapai rata-rata 43,01 persen per tahun antara potensi volume kendaraan riil dengan realisasi uang tunai yang dilaporkan. Temuan ini memperkuat penelitian

sebelumnya oleh Cheisviyanny dkk. (Cheisviyanny et al., 2023) di Kota Padang yang mengungkap bahwa mismanajemen perparkiran berakar dari aliran kas yang tidak transparan serta lemahnya penegakan hukum terhadap oknum pengelola di lapangan. Hambatan administrasi berupa ketidakakuratan data pelaporan fiskal akibat pemungutan tanpa karcis resmi ini juga berjalan selaras dengan evaluasi empiris manajemen parkir konvensional di Kabupaten Pacitan (Sulastiningsih dkk., 2023).

Penerapan kebijakan pemungutan retribusi di Kota Serang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tata kelola di beberapa kota yang telah sukses melakukan modernisasi sistem. Kajian Rahayu dan Handayani (Rahayu dkk., 2023) membuktikan bahwa kebijakan *e-parking* mampu mendongkrak realisasi penerimaan retribusi daerah secara signifikan hingga lebih dari 30 persen melalui pemantauan transaksi *real-time*. Hasil penelitian di Kota Serang justru menunjukkan bahwa pilihan alternatif keputusan untuk digitalisasi penuh belum diambil secara konsisten oleh Dinas Perhubungan akibat keterbatasan komitmen alokasi anggaran dan kesiapan kompetensi sumber daya manusia petugas lapangan. Temuan operasional ini mengindikasikan bahwa implementasi teknologi digital di daerah tingkat menengah tidak dapat dipaksakan secara instan karena karakteristik objek penataan di lapangan masih memerlukan penguatan regulasi lokal yang mengikat serta ketegasan sanksi hukum.

Analisis mendalam menggunakan Teori Optimalisasi (Siringoringo, 2005) memberikan perspektif manajerial baru yang lebih utuh dalam melihat fenomena kegagalan pencapaian target fiskal daerah. Pembahasan berdasarkan dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan keterbatasan sumber daya ini membedakan penelitian penulis dari kajian Fajri dkk. (Fajri dkk., 2024) di Kota Pekanbaru yang lebih menitikberatkan pada analisis rasio pertumbuhan makro tanpa membedah konflik wewenang struktural birokrasi. Kejelasan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah di bawah komando pimpinan daerah yang tegas menjadi faktor penentu utama keberhasilan optimalisasi, melampaui sekadar perhitungan angka potensi kuantitatif di atas kertas. Berikut adalah beberapa temuan penting hasil komparasi antara penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terkait program optimalisasi retribusi parkir antara lain:

a. Rendahnya Kontribusi PAD: Sektor perparkiran di berbagai daerah urban yang dikelola secara konvensional konsisten menyumbang di bawah 1 persen terhadap total pendapatan asli daerah;
b. Kebocoran Finansial Masif: Penerapan sistem karcis manual serta maraknya "sistem kepercayaan" di lapangan menjadi pemicu utama hilangnya potensi keuangan daerah hingga di atas 40 persen;
c. Hambatan Struktural Birokrasi: Ketiadaan wewenang komando langsung dari instansi koordinator pendapatan terhadap instansi teknis pelaksana memperlambat eksekusi reformasi kebijakan;
d. Urgensi Transformasi Digital: Penerapan teknologi informasi berupa *e-parking* nontunai merupakan solusi empiris paling valid untuk meminimalisasi rantai perantara transaksi dan menutup celah manipulasi;
e. Keterbatasan Kesiapan Sumber Daya: Pelaksanaan digitalisasi penuh di daerah berkembang kerap terhambat oleh rendahnya literasi teknologi juru parkir serta keterbatasan anggaran pengadaan perangkat keras.

Secara keseluruhan, diskusi hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan strategi reformasi manajemen retribusi parkir demi mewujudkan akselerasi kemandirian fiskal daerah yang transparan dan akuntabel.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan sejumlah faktor penghambat yang secara signifikan menekan optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Serang. Faktor-faktor tersebut meliputi penetapan target tahunan yang tidak realistis di mana target tahun 2026 justru dinaikkan menjadi Rp4,1 miliar tanpa didukung oleh perbaikan sistem operasional yang memadai. Koordinasi antarinstansi yang berjalan lemah juga menjadi kendala serius karena Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki wewenang komando langsung untuk memerintah ataupun mengevaluasi jajaran Dinas Perhubungan secara struktural. Prosedur operasional yang manual serta berjenjang hingga melewati enam tahapan birokrasi memperbesar peluang terjadinya kebocoran finansial di lapangan. Kendala operasional ini diperparah oleh maraknya praktik "sistem kepercayaan" yang membuat karcis resmi jarang digunakan serta tingginya intensitas parkir liar akibat pemalsuan atribut rompi resmi oleh oknum masyarakat.

Penulis juga mengidentifikasi adanya beberapa faktor pendukung potensial yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Kehadiran Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi landasan hukum yang kuat dan jelas dalam menetapkan tarif resmi per kendaraan demi menjamin kepastian hukum pemungutan. Komitmen politik yang tegas dari Wali Kota Serang melalui ultimatum evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah memberikan dorongan motivasi yang kuat bagi jajaran birokrasi untuk mengoptimalkan PAD. Kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 turut memberikan arah regulasi yang jelas bagi implementasi digitalisasi tata kelola daerah. Keberhasilan taktis pelaksanaan proyek percontohan uji coba *e-parking* di kawasan wisata Banten Lama serta area Alun-alun pusat kota menjadi modal awal yang berharga bagi perluasan sistem pembayaran nontunai secara menyeluruh ke depan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimplukan bahwa optimalisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang belum tercapai secara maksimal akibat kelemahan tata kelola manajemen operasional serta adanya hambatan struktural birokrasi penagihan. Faktor teknis berupa ketergantungan pada sistem pemungutan manual, maraknya parkir liar, serta koordinasi lintas instansi yang lemah menjadi penyebab utama tidak pernah tercapainya target penerimaan tahunan secara optimal. Otoritas daerah perlu segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 agar memuat kewajiban penerapan sistem *e-parking* nontunai secara menyeluruh pada seluruh titik parkir resmi. Dinas Perhubungan juga seyogiannya melaksanakan pendataan ulang komprehensif bagi juru parkir lapangan, melakukan penyesuaian target tahunan berdasarkan kajian potensi riil, serta memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah di bawah pengawasan langsung Sekretaris Daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan fokus yang hanya berpusat pada analisis kualitatif deskriptif mengenai proses tata kelola manajemen operasional penarikan retribusi tanpa mengukur pengaruh finansial tersebut secara numerik kuantitatif. Ruang lingkup pengamatan lapangan juga terbatas pada lingkup instansi internal dan beberapa lokasi parkir strategis di wilayah Kota Serang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan bagi penelitian lanjutan agar dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara presisi

pengaruh digitalisasi parkir terhadap peningkatan PAD. Peneliti masa depan juga dapat memperluas cakupan lokasi penelitian serta memisahkan secara spesifik analisis antara objek parkir tepi jalan umum dengan objek parkir tempat khusus.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin serta kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian, serta seluruh pihak yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan data dan membantu mensukseskan pelaksanaan penulisan ringkasan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ananda, B. S., Sianaga, K., & Siregar, F. A. (2024). IMPLEMENTASI LAYANAN E-PARKING DALAM MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN. *Jurnal Publik Reform*, *11*(1), 1–11. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/4938/pdf

Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Cheisviyanny, C., Rasli, A., Dwita, S., Deviani, & Sari, V. F. (2023). Illegal parking attendants and parking (mis)management: A case study in Padang, West Sumatra, Indonesia. *Asian Transport Studies*, *9*, 100118. https://doi.org/10.1016/j.eastsj.2023.100118

Eliasson, J., & Börjesson, M. (2022). Costs and benefits of parking charges in residential areas. *Transportation Research Part B: Methodological*, *166*, 95–109. https://doi.org/10.1016/j.trb.2022.10.012

Fahlevi, M. R. (2024). ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG. *Journal AK-99*, (Vol. 4 No. 1 (2024): Journal AK-99), 55–63. https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/view/3081/1945

Fajri, Z., Fionasari, D., & Suriyanti, L. (2024). Analisis Pengelolaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal IAKP : Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, *5*, 192–200. https://doi.org/10.35314/iakp.v5.i2.285

Fanggidae, F. O., & Kapioru, C. (2016). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, *1*(1), 63–81. https://jurnalinovkebijakan.com/index.php/JIK/article/view/5

Haerah, K. (2018). KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Politico*, *18*(1), 80–112. https://doi.org/10.32528/politico.v18i1.1373

Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, *2*(1). https://www.neliti.com/publications/195526/efektivitas-dan-kontribusi-penerimaan-retribusi-parkir-terhadap-pendapatan-asli

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lin, T., Rivano, H., & Le Mouel, F. (2017). A Survey of Smart Parking Solutions. *Trans. Intell. Transport. Syst.*, *18*(12), 3229–3253. https://doi.org/10.1109/TITS.2017.2685143

Pierce, G., & Shoup, D. (2013). Getting the Prices Right. *Journal of the American Planning Association*, *79*(1), 67–81. https://doi.org/10.1080/01944363.2013.787307

Purnomo, R. A., Santoso, A., Astuti, I. P., Aviantoro, D., Juwita, A. H., Zaini, F., & Tomlins, R. (2023). SIMULATION OF PUBLIC ROADSIDE PARKING TARIFFS AS AN EFFORT TO ELEVATE REGIONAL RETRIBUTION. *PLANNING MALAYSIA*, *21*(25 SE-Article). https://doi.org/10.21837/pm.v21i25.1240

Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *8*(1), 23–32. http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i12016p023

Rahayu, S. E., Handayani, R., & Febriaty, H. (2023). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *7*(4 SE-), 3702–3711. https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936

Runtu, M. R. G., Razak, N., Tarang, B., Umar, F. A., & Abdullah, A. R. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *JURNAL KEWIRAUSAHAAN*, *9*(3), 199–213. https://www.journal.stieamsir.ac.id/index.php/man/article/view/166

Said, L. B., & Syafey, I. (2021). Case Studies on Transport Policy The scenario of reducing congestion and resolving parking issues in Makassar City , Indonesia. *Case Studies on Transport Policy*, *9*(4), 1849–1859. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.10.004

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sinaga, W., Sinurat, M., & Simanjuntak, T. H. (2025). *SINERGI DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH: Konsep, Aplikasi, dan Empiris*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.

Sinurat, M., Panjaitan, H. M., & Komaedi. (2025). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sulastiningsih, S., Setyowati, H., Puteh, M., & Saputri, Y. E. (2023). KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, *3*(1), 53 – 69. https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i1.552